



**AKTIVISME PETANI TRANSNASIONAL: PERJUANGAN LA VIA CAMPESINA DAN SERIKAT PETANI INDONESIA UNTUK KEDAULATAN PANGAN**

Oleh

Gunawan Lestari Elake<sup>1\*</sup>, Retno Susilowati<sup>2</sup>, Ferdiansyah R<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Email: <sup>1\*</sup>[goen.elake@gmail.com](mailto:goen.elake@gmail.com), <sup>2</sup>[retnosusilowati.yh@gmail.com](mailto:retnosusilowati.yh@gmail.com),  
<sup>3</sup>[ferdiansyah@unsri.ac.id](mailto:ferdiansyah@unsri.ac.id)

**Abstract**

This study aims to understand the transnational peasant activism of La Via Campesina and Serikat Petani Indonesia in striving for food sovereignty agenda, both at the global and national levels. This study uses social movements and transnational activism as theoretical frameworks. The data collection techniques is document analysis. This study shows that the struggle for food sovereignty simultaneously occurs in two model of transnational activism: externalization and internalization. La Via Campesina seeks to internationalize and institutionalize the food sovereignty agenda at the global level, while Serikat Petani Indonesia aims to change public policy at national level

**Keywords Transnational Activism, La Via Campesina, Serikat Petani Indonesia.**

**PENDAHULUAN**

Karl Polanyi dalam *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, berpendapat bahwa akar dari krisis politik global, ekonomi dan sosial pada tahun 1930-an yang memuncak dalam Perang Dunia II dapat ditelusuri jauh kebelakang, yakni pengutamaan atas penerapan sistem *self-regulating market* oleh banyak negara selama abad delapan belas dan sembilan belas. Gerak perluasan dari sistem pasar bebas tersebut secara bersamaan justru menimbulkan gerak penentangan (*countermovement*) yang menginginkan kembalinya kontrol sosial atas pasar: gerakan ganda (*double movement*) (Goodwin, 2018). Problematika Polanyi tersebut adalah juga panorama politik global kontemporer, dimana terdapat ketegangan-ketegangan dalam kompleksitas globalisasi. Kekuatan pasar yang kian mengglobal dengan pengutamaan atas pergerakan modal tanpa batas justru mengaktifkan perlawanan dari berbagai kekuatan sosial yang menolak jatuh kedalam logika kapitalisme-neoliberal. Apa yang menarik disini adalah globalisasi tidak

dapat lagi dipahami semata-mata dalam kerangka efek spasial-temporer tentang bertambah besarnya, bertambah intensnya dan bertambah cepatnya kesalingterhubungan global, namun juga merupakan serangkaian proses penuh tikai dan kontestasi (Gemici & Nair, 2016).

Dalam pengertian tersebut, politik global kontemporer ditandai dengan menyruaknya berbagai kelompok gerakan sosial. Penekanannya terhadap isu keadilan global, kontrol demokratik yang lebih luas atas kehidupan politik, serta pengorganisasian tata dunia alternatif yang emansipatoris merupakan cerminan umum berbagai gerakan tersebut. Menariknya, meskipun berakar pada problem-problem lokal, gerakan tersebut bergerak melampaui batas-batas lokal dan nasionalnya dengan membentuk jaringan solidaritas dan kampanye di tingkat global. Gerakan ini, dengan demikian, berkarakter transnasional yang tidak bersifat tunggal, terdapat keragaman antara satu dan lainnya, baik secara ideologi, isu, strategi maupun agensi; gerakan buruh,



petani, hak asasi manusia, lingkungan, feminisme, dan sebagainya (Zajak, 2017).

Salah satu kelompok sosial yang terlibat dalam gerakan sosial tersebut adalah petani. Bagi gerakan ini, kebijakan neoliberal di sektor pertanian merupakan akar dari problem kemiskinan dan ketimpangan yang dialami petani dan masyarakat pedesaan pada umumnya. Kredo utama neoliberal yakni liberalisasi, privatisasi dan komodifikasi telah menyebabkan korporatisasi massal di sektor pertanian seperti meningkatnya kepemilikan tanah di tangan beberapa Korporasi Transnasional (*Transnational Corporations*), modifikasi genetik dan monopoli hak atas kekayaan intelektual, serta menipisnya sumberdaya alam di berbagai belahan dunia (Turniawan, 2013). Pada level institusional, kebijakan tersebut ditopang oleh Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) melalui mekanisme *Agreement on Agriculture* (AOA) yang pada prinsipnya bertujuan untuk memperluas liberalisasi perdagangan di bidang pertanian melalui pengurangan subsidi domestik, subsidi ekspor dan peningkatan akses pasar domestik dengan penghapusan hambatan impor dan pengurangan tarif (Clapp, 2015).

Lebih lanjut, agenda neoliberal tersebut tidak hanya dipandang merugikan petani dan masyarakat pedesaan tetapi juga dianggap menjadi akar dari masalah krisis pangan dunia. Monopoli produksi dan distribusi pangan oleh perusahaan-perusahaan agribisnis multinasional menyebabkan terjadinya bencana kelaparan akibat minimnya akses masyarakat miskin terhadap pangan. Ketika krisis pangan terjadi pada tahun 2008 akibat tingginya harga pangan yang memicu protes masyarakat di berbagai negara berkembang, sejumlah perusahaan agribisnis multinasional justru mengalami kenaikan hasil panen dan profit secara global (Bohstedt, 2016; Holt Giménez & Shattuck, 2011). Menurut catatan Bank Dunia, lebih dari 90 persen kelaparan dunia disebabkan oleh masyarakat yang terlalu miskin untuk dapat

membeli makanan yang cukup. Sekitar setengah dari orang di negara berkembang berpenghasilan kurang dari dua dolar sehari. Hampir 20 persen adalah "sangat miskin" yang berpenghasilan kurang dari satu dolar per hari. Banyak dari mereka yang secara resmi digolongkan miskin tersebut adalah petani subsisten yang memiliki akses terbatas ke tanah dan air dan tidak dapat bersaing di pasar global (Holt-Giménez, 2017). Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), pada tahun 2019 lebih dari 280 juta orang di dunia berada dalam situasi kelaparan. Mereka tersebar di sejumlah sub-kawasan Afrika, Asia dan Amerika Latin. Fakta lain yang sangat mengkhawatirkan adalah bahwa sekitar 2 miliar orang di dunia mengalami kerawanan pangan pada tingkat sedang dan parah, yang sebagian besar terkonsentrasi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.. Kurangnya akses terhadap makanan bergizi dan cukup menempatkan mereka pada risiko yang besar kekurangan gizi dan kesehatan buruk (FAO, 2019). Selain itu, alih fungsi lahan pertanian dalam jumlah besar di negara-negara berkembang memberikan tekanan yang signifikan terhadap ketersediaan makanan pokok.

Kenyataan tersebut memicu protes dan perlawanan petani di berbagai belahan dunia, dan bahkan bergerak melampaui lokalitasnya. Di Amerika Latin gerakan petani terbesar adalah *Movimento Sem Terra* (Gerakan Tanpa Tanah) yang berpusat di Brazil, dengan jumlah anggota sekitar 1,5 juta orang. Komitmen utamanya adalah reforma agraria dan mengakhiri kebijakan pasar bebas. Aksi politiknya yang khas dari gerakan ini adalah pendudukan tanah yang massif serta aliansi politik nasional dan internasional (Hoddy & Ensor, 2018). Gerakan ini memberikan inspirasi bagi muncul dan berkembangnya gerakan-gerakan serupa di Amerika Latin dan Afrika (Rosa, 2015).

Di India, salah satu gerakan petani penting yang mula-mula menentang WTO



adalah *Kainaka State Farmers' Association* (KRRS). Gerakan ini mengkritik kesepakatan hak intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property*) WTO yang membuka jalan bagi penguasaan hak paten bagi sumber daya alam dan pengetahuan tradisional, serta merampas hak-hak komunitas terhadap sumber daya yang telah mereka jaga selama beberapa generasi. Gerakan ini secara efektif membangun aliansi dengan organisasi massa lain yang peduli dengan dampak neoliberalisme di India seperti gerakan perempuan, masyarakat adat dan nelayan. Pada musim panas 1999, KRRS mengorganisir kampanye di sejumlah negara Eropa Barat untuk memperluas solidaritas dalam perjuangan menentang perusahaan-perusahaan multinasional tersebut. Tidak hanya di negara-negara berkembang, salah satu aksi penting yang mendapatkan perhatian masyarakat internasional dan menjadi simbol perlawanan global petani adalah aksi anggota Konfederasi Petani Prancis (*French Confederation Paysanne*) yang membongkar bangunan McDonalds yang sedang dibangun di Millau, Selatan Prancis. Organisasi ini juga memiliki peran penting dalam mendorong sikap Uni Eropa yang melarang penanaman komersil atas tanaman rekayasa genetika (Bourad, 2017; Edelman & Borras, 2016).

Di tingkat global, gerakan petani berkembang dengan cara yang sama sekali tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Mereka terhubung antara satu dengan lainnya melalui jaringan dan aliansi gerakan petani global. Bersama berbagai sektor masyarakat sipil global lainnya, gerakan petani terlibat dalam protes dan demonstrasi pada setiap pertemuan ekonomi dan perdagangan dunia. Tuntutan utamanya adalah reformasi agrarian, perdagangan yang adil, kedaulatan pangan, isu lingkungan serta hak asasi manusia (Edelman & Borras, 2016). Mereka berusaha mendesak dan memajukan kepentingannya justru dengan memanfaatkan proses-proses global yang terjadi. Bagi sementara kalangan penstudi Hubungan Internasional fenomena

internasionalisasi perjuangan masyarakat sipil dunia (termasuk petani) seringkali disebut dengan istilah 'globalisasi dari bawah' sebagai perlawanan terhadap 'globalisasi dari atas' yang semata-mata bertumpu pada kepentingan neoliberal dan korporasi (Baylis et al., 2017). Sidney Tarrow (2005) memperkenalkan konsepsi *Transnasional Activism* untuk menjelaskan fenomena tersebut yakni proses transformasi aktor gerakan menjadi pelaku gerakan lintas batas dengan berbasis pada problem lokalitasnya.

Salah satu bentuk aktivisme transnasional tersebut yang penting dalam gerakan petani kontemporer adalah *La Via Campesiana*. Organisasi ini berdiri pada tahun 1993 pada sebuah konferensi yang diselenggarakan di Mons, Belgia. Konferensi ini dihadiri oleh 46 perwakilan dari organisasi petani, petani kecil, masyarakat adat dan buruh tani dari berbagai negara (*La Via Campesina*, 2019). *La Via Campesina* memiliki anggota 182 organisasi lokal dan nasional di 81 negara dari Afrika, Asia, Eropa dan Amerika, yang kesemuanya mewakili sekitar 200 juta petani. Gerakan ini bersifat otonom, pluralis, multikulturalis, dan politis dalam tuntutannya untuk keadilan sosial, serta independen dari partai politik, ekonomi dan berbagai afiliasi serupa (*La Via Campesina*, 2019). Secara organisatoris, gerakan ini menerapkan model kepemimpinan yang terdesentralisasi sebab bagaimanapun juga sumber legitimasinya terletak pada organisasi petani lokal. Sekretariat internasional dirotasi sesuai dengan keputusan kolektif yang dibuat setiap empat tahun oleh Konferensi Internasional. Pertama kali berlokasi di Belgia (1993-1996), kemudian di Honduras (1997-2004), Indonesia (2005-2013), dan saat ini berbasis di Harare, Zimbabwe sejak 2013 (*La Via Campesina*, 2019).

Sejak awal berdiri organisasi ini menjadi aktor sekaligus arena bertindak untuk perjuangan transnasional petani terhadap neoliberalisme, menuntut akuntabilitas institusi ekonomi dan perdagangan global, dan menolak



penguasaan korporasi multinasional atas sumber daya alam dan teknologi. Isu utama gerakan adalah mempromosikan kedaulatan pangan; menuntut reformasi agraria; kontrol orang atas tanah, air, wilayah; menolak perdagangan bebas; mempromosikan hak-hak petani perempuan, menegakkan hak asasi manusia, hak-hak pekerja migran; mempromosikan agroekologi; mempromosikan sistem benih petani; meningkatkan partisipasi pemuda dalam pertanian. (La Via Campesina, 2016) Pada perkembangannya, gerakan ini telah menempatkan penekanan yang lebih besar pada isu-isu gender dan hak-hak perempuan, memperkuat penentangannya terhadap perusahaan transnasional, serta mengadvokasi problem ekologis (Graddy-Lovelace, 2017). Gerakan ini juga berupaya menciptakan kembali identitas kolektif petani yang bersifat lintas batas baik teritorial maupun kultural, dan bekerjasama dengan sektor gerakan masyarakat sipil lainnya dalam menentang agenda neoliberalisme global (Redecker & Herzig, 2020).

Kedaulatan pangan merupakan isu penting dari organisasi tersebut. Istilah ini merujuk pada pengertian bahwa orang-orang yang memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi makanan harus memiliki kendali atas mekanisme dan kebijakan produksi dan distribusi makanan, ketimbang korporasi dan institusi pasar diyakini mendominasi sistem pangan global saat ini. Pengertian ini juga mencakup hak masyarakat atas makanan yang sehat dan sesuai dengan budaya, serta hak untuk menentukan sistem pertanian mereka sendiri. Istilah 'makanan yang sesuai dengan budaya' memiliki makna bahwa makanan yang tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat harus sesuai dengan latar belakang budaya orang yang mengkonsumsinya. Sistem produksi pertanian harus senantiasa mempertimbangkan keberlanjutan ekologis. Lebih lanjut, prinsip kedaulatan pangan ini dianggap merupakan alternatif bagi dominasi rezim perdagangan dan korporasi makanan global, dengan

memprioritaskan ekonomi dan pasar lokal yang bertumpu pada kontrol dan pemberdayaan petani lokal (Borras Jr et al., 2015).

Di Indonesia, organisasi petani yang berafiliasi dengan *La Via Campesina* adalah Serikat Petani Indonesia (SPI). Organisasi ini pada awalnya bernama Federasi Serikat Petani Indonesia, yang dideklarasikan pada bulan Juli 1998 Kampung Dolok Maraja, Desa Lobu Ropa, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara oleh sejumlah aktivis petani di Indonesia. Kemunculan organisasi ini adalah proses panjang konsolidasi gerakan petani akibat tekanan negara dan kapital yang memarjinalisasi petani di Indonesia, dan terbukanya kesempatan politik demokratis pasca-reformasi. Sebagaimana *La Via Campesina*, SPI adalah organisasi yang konsisten dan masif mendorong isu kedaulatan pangan di Indonesia. Bagi organisasi ini, kedaulatan pangan kedaulatan pangan akan tercapai apabila petani sebagai penghasil pangan memiliki, menguasai dan mengontrol alat-alat produksi pangan seperti tanah, air, benih dan teknologi serta berbagai kebijakan yang mendukungnya dalam bingkai pelaksanaan reforma agrarian (SPI, 2015). Organisasi ini terlibat dalam berbagai pertemuan dan konferensi internasional *La Via Campesiana*, termasuk dalam perjuangannya untuk mengadvokasi isu-isu kedaulatan pangan di tingkat global. Ketua SPI, Henry Saragih, bahkan pernah menjabat kordinator umum *La Via Campesiana* dua periode (2004-2008 dan 2008 dan 2013), yang aktif menjalankan lobi dan koordinasi di PBB dalam memperjuangkan Hak Asasi Petani untuk menjadi Konvensi Internasional. Pada Konferensi *La Via Campesina* ke-7 di Bilbao, Spanyol (2017), SPI mempertegas komitmennya untuk terus memperjuangkan kedaulatan petani sebagai penyedia pangan dunia, terutama di Indonesia, sehingga kedaulatan pangan dapat terwujud di Indonesia (SPI, 2017).

Dengan demikian, penelitian ini akan mengeksplorasi aktivisme petani transnasional



melalui afiliasi *La Via Campesina* dan Serikat Petani Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan pangan di tingkat global dan Indonesia.

### LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial dan aktivisme transasional untuk memahami gerakan petani sebagai sebuah gerakan sosial, serta mekanisme dan pola gerakan petani sebagai gerakan transnasional, dalam upaya mereka memperjuangkan kedaulatan pangan.

Gerakan sosial adalah salah satu bentuk sosial penting yang melaluinya suatu kolektivitas sosial menyuarkan keluhan (*grievances*) dan keprihatinan mereka tentang hak dan kesejahteraan mereka sendiri maupun orang lain dengan terlibat dalam berbagai jenis aksi kolektif (*collective action*), seperti protes jalanan, yang berfungsi untuk mendramatisasi keluhan dan keprihatinan mereka, serta tuntutan (*demand*) untuk mengatasi problem-problem tersebut (Snow et al., 2018). Sementara itu, Sidney Tarrow (2011) menempatkan gerakan sosial sebagai bagian dari *contentious politics* (politik perseteruan), yang mengemuka ketika orang-orang biasa – seriangkali dalam sebuah aliansi dengan kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh berikutan perubahan-perubahan dalam suasana batin masyarakat – bergabung dalam konfrontasi dengan elit, otoritas dan lawan. *Contentious politics* terjadi ketika perubahan-perubahan kesempatan politik (juga hambatan) menciptakan dorongan bagi aktor yang tidak memiliki sumberdaya untuk melancarkan aksi kolektif.

Sementara istilah *Transnational Activism* merujuk pada perluasan jaringan gerakan sosial yang lintas batas. Tarrow menjelaskan *Transnational Activism* sebagai agenda transformatif yang akan mengubah aktor dalam protes domestik menjadi pelaku gerakan transnasional dengan tetap mengakar pada konteksnya sejarah dan kultur gerakan lintas

batasnya. Transformasi ini bisa menjadi perantara dalam gerakan sosial pada level global menuju satu identitas antara banyak identitas lokal, nasional, dan transnasional (Tarrow, 2005).

Selanjutnya, Della Porta dan Tarrow (Porta, 2004) membagi aktivitas transnasional ke dalam dua model, yakni; (a) model *Internalisasi*, proses ini menjelaskan proses aktivitas politik dalam membentuk isu global melalui gerakan sosial disuatu tempat dengan memobilisasi kekuatan sumber daya atau massa aksi dalam lingkup domestik. Hal ini dilakukan untuk melakukan penetrasi politik kepada pemerintah yang dianggap bertanggung jawab atas kebijakan yang dianggap timpang, dan; (b) model *Eksternalisasi*, proses ini mengacu pada propaganda informasi dan upaya negosiasi di tingkatan nasional dan internasional dengan tujuan untuk menyokong aliansi gerakan sosial global. Pada model ini, gerakan sosial dan aktivis organisasi berfokus kepada lembaga-lembaga internasional untuk memobilisasi sumber daya yang dapat digunakan di tingkat global.

Penelitian ini akan menerapkan kedua model tersebut untuk memahami mekanisme, mobilisasi sumberdaya, dan pembingkaihan isu yang dijalankan oleh *La Via Campesina* dan Serikat Petani Indonesia untuk memperjuangkan isu kedaulatan pangan.

### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sementara jenis penelitian adalah studi kasus. Menurut (Creswell, 2014), penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sementara menurut (Neuman, 2013) metode ini berusaha untuk memahami hakikat realitas sosial dan mengungkap bagaimana individu menyusun pemaknaan mereka atas satu hal.

Jenis penelitian studi kasus pada hakekatnya bertujuan untuk memahami konteks suatu peristiwa atau fenomena





(Ellinger et al., 2005). Studi kasus penelitian ini adalah aktivisme transnasional La Via Campesina dan Serikat Petani Indonesia. Menganalisis perjuangan dan keterhubungan keduanya dalam memajukan isu kedaulatan pangan.

Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, yang dihimpun dari berbagai dokumen, literatur, artikel, dan berita yang relevan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. La Via Campesina & Perjuangan Kedaulatan Pangan Global

Pada bagian ini penulis akan menganalisis perjuangan kedaulatan pangan global oleh La Via Campesina. Terdapat dua aspek yang akan dibahas yakni (a) upaya La Via Campesina dalam mengarusutamakan isu kedaulatan pangan, dan (b) institusionalisasi kedaulatan pangan melalui partisipasinya dalam organisasi internasional.

#### *Internasionalisasi Isu Kedaulatan Pangan*

Salah satu karakteristik utama dari aktivisme transnasional adalah pembingkai identitas kolektif, yakni memproduksi makna, membingkai dan menyebarkan suatu ide, gagasan, dan kepercayaan tertentu sehingga membentuk solidaritas dan partisipasi pihak lain. Dalam pengertian tersebut, tahapan awal perjuangan La Via Campesina adalah mengarusutamakan isu kedaulatan pangan di tingkat internasional, sehingga mendapatkan perhatian komunitas internasional dan pada gilirannya menjadi norma global. Upaya ini dilakukan melalui kampanye pada berbagai fora internasional, baik yang bersifat inter-governmental maupaun jaringan organisasi non-pemerintah dan gerakan sosial. Berikut adalah berbagai upaya internasionalisasi isu kedaulatan pangan oleh La Via Campesina:

Konsep kedaulatan pangan pertama kali diajukan oleh LVC pada World Food Summit (WFS) di Roma, Italia tahun 1996. Pertemuan

ini dilaksanakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), dan LVC merupakan representasi dari masyarakat sipil (European Cordination Via Campesina, 2018). Konsep ini merupakan alternatif terhadap keterbatasan konsep ketahanan pangan yang dikembangkan oleh FAO, dimana problem krisis pangan (bencana kelaparan dan malnutrisi) dipandang semata-mata sebagai masalah kekuaran pasokan pangan sehingga solusinya justru mengintesifkan liberalisasi pertanian. Sementara itu, konsep kedaulatan pangan menekankan hak atas pangan melalui sistem produksi, distribusi dan konsumsi yang berperspektif ekologis, berkeadilan dan menghargai keragaman sistem pangan lokal (Wittman et al., 2010). Dalam pengertian ini, menurut penulis LVC mengkonstruksi frame bahwa akar dari problem krisis pangan adalah sistem ekonomi neoliberal (*diagnostic frame*) dan kedaulatan pangan merupakan jalan keluar dari problem-problem tersebut (*prognostic frame*).

Pada tahun 1999-2004, LVC menjalankan agenda *Global Campaign for Agrarian Reform* melalui jaringan organisasi anggotanya di berbagai negara. Kampanye ini mendorong perubahan kebijakan pertanahan pemerintahan nasional yang memungkinkan tersedianya akses dan proteksi atas tanah bagi petani (Claeys, 2013; Rosset, 2018) Reformasi agrarian ini tentu saja merupakan pilar utama dari kedaulatan pangan sebab kemandirian petani dalam memproduksi dan mendistribusikan produk pertanian mensyaratkan adanya politik agraria yang memberikan jaminan akses tanah bagi petani. Kampanye ini merupakan respon terhadap trend alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan investasi dan monopoli kepemilikan lahan oleh perusahaan-perusahaan agribisnis besar di banyak negara.

Dalam konteks mobilisasi LVC menginisiasi terbentuknya aliansi dengan berbagai sektor sosial lainnya, seperti serikat pekerja, gerakan lingkungan, hak asasi



manusia, masyarakat adat, dan sebagainya, untuk memberi tekanan pada institusi-institusi internasional seperti Bank Dunia, IMF, WTO, PBB dan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). LVC terlibat aktif dalam forum, lobi dan protes masyarakat sipil dunia terhadap impilkasi perdagangan bebas bagi nasib petani di berbagai belahan dunia (Claeys, 2013). Bagi LVC, perdagangan bebas mengakibatkan dominasi produk pertanian korporasi agribisnis transnasional, privatisasi sumber daya alam, dan meningkatnya kontrol korporasi terhadap produksi dan distribusi pangan global. Hal ini tentu saja merugikan petani, sebab mereka dipaksa untuk berkompetisi secara terbuka dengan kapasitas yang sangat terbatas. Kampanye kedaulatan pangan dijalankan oleh LVC bersamaan dengan protes terhadap perdagangan bebas dalam pertemuan-pertemuan WTO. Pada peretemuan tingkat Menteri WTO di Cancun Meksiko tahun 2003, LVC bersama-sama jaringan masyarakat sipil global lainnya berkontribusi terhadap batalnya sejumlah kesepakatan yang dinilai merugikan petani di negara-negara dunia ketiga (Via Campesina, 2003).

Pada tahun 2007, LVC menginisiasi terlaksananya Forum Global untuk Kedaulatan Pangan (*Forum for Food Sovereignty*) di Mali. Terdapat sekitar 500 delegasi dari lebih 80 negara yang terlibat dalam forum ini. Forum ini berhasil merumuskan konsep kedaulatan pangan yang kemudian tertuang dalam Deklarasi Nyeleni, dan berkomitmen untuk menjadikan 'hak rakyat atas kedaulatan pangan' sebagai platform politik aktivisme gerakan petani transnasional. Berikut enam pilar kedaulatan pangan yang dihasilkan dalam pertemuan ini, yakni(Declaration of Nyeleni, 2007; European Cordination Via Campesina, 2018):

1. Pangan untuk Rakyat: hak atas pangan yang cukup, sehat dan sesuai budaya untuk semua individu, masyarakat dan komunitas, dan menolak pandangan bahwa

pangan hanyalah komoditas agribisnis internasional.

2. Penghargaan terhadap penyedia pangan: penghormatan terhadap hak, perempuan dan laki-laki, petani dan keluarga petani skala kecil, penggembala, nelayan, penghuni hutan, masyarakat adat dan pekerja pertanian dan perikanan, termasuk migran, yang mengolah, menanam, memanen dan mengolah makanan; dan menolak kebijakan, tindakan dan program yang mengancam dan menghilangkan mata pencaharian mereka.
3. Sistem pangan lokal: pengutamaan sistem pangan lokal, dan partisipasi luas setiap penyedia pangan dalam pengambilan keputusan terkait pangan. Menolak struktur pemerintahan, perjanjian dan praktik yang bergantung pada dan mempromosikan perdagangan internasional yang tidak berkelanjutan dan tidak adil.
4. Kontrol lokal: mempromosikan hak masyarakat lokal dalam hal pengelolaan sumber daya alam, dan menolak privatisasi sumber daya alam.
5. Pengetahuan dan Keterampilan: mempromosikan pentingnya pengetahuan dan ketrampilan berbasis kearifan lokal dalam melestarikan, mengembangkan dan mengelola sistem produksi pangan lokal, dan menolak teknologi yang merusak dan mengancam hal tersebut, seperti rekayasa genetika.

Selain itu, LVC tergabung dalam *The International Planning Committee for Food Sovereignty* (IPC), sebuah aliansi global yang terdiri dari produsen pangan skala kecil, petani, nelayan, masyarakat adat, petani tanpa tanah, dan pekerja pedesaan. Aliansi ini menghimpun lebih dari 6000 organisasi yang total anggotannya mencapai 300 juta orang dari berbagai negara (European Cordination Via Campesina, 2018; International Planning Committee for Food Sovereignty (IPC), 2015). Aliansi ini memiliki komitmen kuat untuk



mendorong prinsip-prinsip kedaulatan pangan sebagaimana yang mengemuka dalam Deklarasi Nyeleni diatas. Dengan demikian, nampak bahwa kampanye LVC untuk kedaulatan pangan mampu menghubungkan berbagai sektor masyarakat sipil dalam sebuah isu bersama. Dapat dikatakan pula bahwa isu kedaulatan pangan ini telah berkembang menjadi nilai global bagi jaringan aktivisme transnasional ini. Pada perkembangannya, IPC menjadi sarana penghubung kepentingan gerakan petani transnasional dengan institusi internasional seperti FAO.

### ***Institusionalisasi Kedaulatan Pangan***

Selain mendorong internasionalisasi isu pangan melalui berbagai aksi kolektif dan pembangunan aliansi tersebut diatas. LVC juga berupaya untuk menginstitusionalisasi isu pangan melalui lobi, negosiasi dan partisipasi pada berbagai forum, organisasi dan rezim internasional.

Menjelang WTO Ministerial di Doha (2001), LVC, beraliansi dengan jaringan besar gerakan sosial dan organisasi non-pemerintah (LSM), menuntut agar hak kedaulatan pangan diabadikan dalam Konvensi Internasional (Claeys, 2013). Pada tahun 2004, aktivis Prancis Jose Bove menyampaikan seruan LVC mengenai penting adanya Konvensi Kedaulatan Pangan kepada Sekretaris Jenderal PBB saat itu Kofi Annan, meminta untuk mendukung organisasi Via Campesina dalam upaya mereka agar kedaulatan pangan diakui sebagai hak asasi manusia yang baru (Via Campesina, 2003).

Pasca krisis harga pangan dunia tahun 2007-2008, FAO mereformasi Komite Ketahanan Pangan Dunia (CFS) yang menangani keamanan pangan, pertanian dan nutrisi. Reformasi ini memunculkan model tata Kelola alternatif untuk pengambilan keputusan mengenai isu-isu global, yang cakupan keanggotaannya diperluas, tidak hanya negara, melainkan juga sektor privat dan masyarakat sipil. LVC memanfaatkan keterbukaan ini untuk berpartisipasi aktif dalam mendorong isu

kedaulatan pangan pada lembaga tersebut. Salah satu pencapaian penting dari partisipasi masyarakat sipil dalam komite ini adalah adanya Panduan Tata Kelola yang Bertanggung Jawab atas Penguasaan Tanah, Perikanan dan Hutan dalam Konteks Ketahanan Pangan (VGGT) pada tahun 2012, yang memberikan jaminan akses sumber daya alam untuk produksi pangan bagi organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia (European Cordination Via Campesina, 2018).

Pencapaian penting lainnya ialah, pada tahun 2013 FAO dan LVC menyepakati kerangka instusional kemitraan kedua belah pihak untuk kolaborasi dalam memajukan kedaulatan pangan (FAO, 2013).

### **B. Perjuangan Serikat Petani Indonesia untuk Kedaulatan Pangan di Indonesia Isu Kedaulatan Pangan dan Hak Asasi Petani**

Berakhirnya pemerintahan otoriter Orde Baru nampaknya membuka struktur kesempatan bagi kemunculan organisasi-organisasi independen di Indonesia. Jika sebelumnya, saluran politik hanya bisa dijalankan melalui organisasi yang diakui pemerintah, kini banyak dari sektor sosial masyarakat sipil memiliki ruang untuk berserikat dan menghimpun diri, termasuk Serikat Petani Indonesia. Meski begitu, perubahan tersebut tidak serta merta diikuti dengan perubahan posisi petani dalam struktur ekonomi politik Indonesia. Problem-problem lama seperti konflik agraria, kekerasan terhadap petani dan pengambilalihan tanah masih mengemuka. Adaptasi kebijakan neoliberal di Indonesia sebagai resep atas krisis ekonomi justru memperlemah posisi petani kecil. Berdirinya SPI adalah respon terhadap situasi tersebut, sekaligus menjadi sarana artikulasi kepentingan petani baik di tingkat lokal maupun nasional.

Salah satu respon penting SPI adalah dimunculkan diskursus Hak Asasi Petani sebagai basis bagi kedaulatan pangan. Inisiatif ini dimulai dengan dilaksanakannya





‘Konferensi Nasional Pembaharuan Agraria untuk Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Petani’ pada tahun 2001. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan anggota SPI dari berbagai daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, terutama perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (Purwanto, 2007). Hasilnya ‘Deklarasi Hak-Hak Asasi Petani Indonesia’ yang berisi: (a) Hak-petani atas hidup; (b) Hak atas penguasaan dan pemakaian sumber daya alam dan kemampuan pribadinya; (c) Hak petani atas berproduksi; (d) Hak petani atas konsumsi; (e) Hak petani akan pemasaran produk, pengadaan asupan, dan jaminan mutu akan produknya; (f) Hak petani untuk berorganisasi; (g) Hak petani akan perlanjutan keturunannya serta makhluk hidup lainnya yang menjamin kelangsungan hidupnya; (h) Hak petani atas pengungkapan (Purwanto, 2007).

#### **Mobilisasi SPI: Advokasi dan Kampanye**

Terdapat sejumlah mobilisasi yang dilakukan oleh SPI dalam bentuk aksi massa, kampanye dan advokasi kebijakan untuk kedaulatan pangan di Indonesia

Mobilisasi SPI terbesar pertama kali dilakukan dalam bentuk di Gelora Basket Senayan. Diikuti 4000 anggota SPI dan sejumlah perwakilan pemerintah. Sejumlah isu yang mengemuka adalah kasus-kasus sengketa pertanahan, perundangundangan, soal pupuk, hingga kesulitan membayar hutang. (Purwanto, 2007)

Selanjutnya SPI melakukan aksi demonstrasi menolak Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) No. IX /MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) pada akhir 2001. Bagi SPI, ketetapan berisi pasal yang memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin merevisi atau mencabut UUPA 1960.

SPI terlibat aktif dalam pembentukan suatu aliansi lintas sektoral yang dinamakan Gerakan Rakyat Melawan Neo-Kolonialisme atau ‘Gerak Lawan’. Aliansi ini mengkritik

kuatnya intervensi institusi finansial global, semacam International Monetary Fund-IMF, World Bank, Asian Development Bank-ADB, WTO dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Pada tahun 2003, SPI terlibat aktif dalam pembentukan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP). Koalisi ini terdiri dari berbagai organisasi petani dan jaringan organisasi non-pemerintah. Salah satu aksi penting koalisi ini adalah penolakan impor beras dalam bentuk dengar pendapat dengan DPR. Pada perkembangannya, koalisi ini berhasil mendorong UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan untuk mencegah konversi lahan pertanian ke non pangan (KKRP, 2019; SPI, 2015).

Pada Februari 2011, SPI bersama sejumlah organisasi tani lainnya, organisasi sosial, LSM, hingga para akademisi menggagas suatu Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia. Petisi Kedaulatan Pangan ini bertujuan untuk memperkuat dan memperluas desakan kepada pemerintah untuk mengubah sistem pangan dan pertanian yang ada saat ini demi melindungi dan memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia (SPI, 2015).

SPI bersama *Indonesia Human Right Commission for Social Justice* (IHCS), Solidaritas Perempuan (SP), Bina Desa dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mengajukan naskah akademik perubahan UU Pangan No. 7/1996 guna menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan kepada setiap warga negara. Hasilnya adalah disahkannya UU Pangan No. 18 tahun 2012 yang berisi tentang prinsip-prinsip kedaulatan pangan. Perjuangan Panjang SPI bersama gerakan masyarakat sipil lainnya berhasil mendorong lahirnya UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (SPI, 2015).

#### **Keterhubungan SPI dengan LVC**



Sejak awal berdirinya, SPI telah terlibat dalam gerakan petani transnasional melalui LVC. Pada Konferensi Kedua La Via Campesina di Meksiko 1996, pendiri SPI telah diundang sebagai peninjau dalam acara tersebut. Adanya persamaan prinsip dan perjuangan utama untuk kepentingan petani mendorong SPI kemudian bergabung ke LVC. Pada Konferensi La Via Campesina tahun 2000 di Bangalore, SPI dipilih sebagai Koordinator Regional untuk Wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur. Sebagai koordinator SPI terlibat aktif dalam serangkaian mobilisasi internasional seperti pertemuan tingkat Menteri WTO di Qatar, KTT Pangan Dunia FAO, KTT Bumi Rio de Janeiro, dan berbagai kegiatan internasional lainnya.

Puncaknya adalah pada Konferensi Keempat di Brazil, Ketua SPI, Henry Saragih, dipercayakan untuk memimpin sekretariat internasional LVC sebagai koordinator umum (2004-2008). Peran SPI dalam LVC menjadi semakin besar ketika pada konferensi kelima Henry Saragih kembali dipercayakan sebagai koordinator internasional LVC. Pada Konferensi La Via Campesina ke-7 di Bilbao, Spanyol (2017), SPI mempertegas komitmennya untuk terus memperjuangkan kedaulatan petani sebagai penyedia pangan dunia, terutama di Indonesia, sehingga kedaulatan pangan dapat terwujud di Indonesia (SPI, 2017).

Terakhir, pencapaian monumental dari keterhubungan dua organisasi ini adalah setelah melalui serangkaian lobi dan koordinasi di PBB, LVC dan SPI berhasil mendorong disahkannya Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Perdesaan' (*United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Working People in Rural Areas*) melalui Sidang Umum PBB pada 17 Desember 2018. Menurut penulis, menarik untuk diperhatikan bahwa sejak awal berdirinya SPI telah mengusung isu hak asasi petani sebagai fundamen dari kedaulatan pangan, dan aktif terlibat mengadvokasi isu tersebut melalui LVC dalam forum-forum internasional. Hal tersebut

mencerminkan signifikansi SPI dalam aktivisme petani transnasional. Organisasi ini dapat dikatakan relatif berhasil mengartikulasi isu tersebut dan menjadikannya sebagai agenda utama LVC.

Aktivisme transnasional melalui keterhubungan SPI dan LVC ini memiliki dua makna penting, yakni: pertama, SPI mendapatkan akses dan jaringan luas dalam menyerukan problem-problem petani di Indonesia kepada masyarakat sipil global, sekaligus mentransformasikan ruang perjuangan yang bersifat domestik menjadi global. Bahwa problem-problem petani tersebut berkaitan erat dengan tata kelola ekonomi politik global yang memarginalisasi petani. Kedua, LVC menyediakan solidaritas dan advokasi di tingkat global untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menjadikan kedaulatan pangan sebagai agenda utama perjuangan global. Hal ini juga berarti bahwa LVC ruang pertukaran gagasan dan ide untuk menghimpun dan mengartikulasi problem-problem spesifik dan partikular yang dihadapi aktor-aktor petani di tingkat lokal menjadi sebuah isu bersama yang universal. Dengan begitu, LVC mampu mentransformasikan dirinya sebagai representasi global dari perjuangan petani sekaligus memperkuat *bargaining position* dalam kontestasi dan interaksinya dengan aktor-aktor global lainnya. Sejumlah keberhasilan LVC tersebut di atas merefleksikan padunya keterhubungan LVC dengan aktor-aktor gerakan petani lokal, termasuk SPI.

## KESIMPULAN

Perjuangan La Via Campesina dan SPI dalam memperjuangkan kedaulatan pangan berjalan dalam dua mekanisme yang bekerja secara simultan dan saling terhubung sebagaimana konseptualisasi Della Porta dan Sidney Tarrow, yakni eksternalisasi dan internalisasi. Mekanisme eksternalisasi dijalankan oleh La Via Campesina melalui internasionalisasi dan institusionalisasi isu



kedaulatan pangan. Internasionalisasi isu berkaitan dengan upaya LVC untuk menjadikan kedaulatan pangan sebagai sebuah kesadaran global yang penting. Sementara institusionalisasi berkaitan dengan upaya menjadikan kedaulatan pangan sebagai norma global, melalui organisasi, institusi dan rezim internasional.

Sementara SPI menjalankan mekanisme internalisasi, yang mengambil bentuk berupa mobilisasi sumber daya (aksi, kampanye dan advokasi) di tingkat domestik yang menasar perubahan-perubahan kebijakan nasional. Meski begitu, sebagai anggota LVC, SPI memiliki peran yang signifikan dalam organisasi ini dan turut menentukan pencapaian-pencapaian advokasi LVC di tingkat global. Dalam pengertian tersebut, SPI mentransformasikan ruang perjuangan yang sebelumnya bersifat domestik menjadi global, sekaligus memanfaatkan akses sumberdaya jaringan yang luas melalui SPI untuk memperkuat perjuangan domestik.

Aktivisme gerakan petani transnasional yang dijalankan oleh LVC dan SPI dalam memperjuangkan kedaulatan pangan setidaknya merefleksikan dua hal penting dalam studi hubungan internasional kontemporer, yakni: pertama, globalisasi tidak hanya dipandang semata-mata sebagai kompresi ruang dan waktu dimana pergerakan modal, barang, jasa dan orang yang semakin intensif, tetapi juga dipandang sebagai proses yang kontradiktif dan penuh tikai. Bagi gerakan petani, tata kelola ekonomi politik global justru menjadi akar bagi problem marginalisasi petani dan krisis pangan. Kedua, proses tersebut memungkinkan mengemukanya transformasi ruang politik global, dimana interaksi aktor yang lintas batas tidak hanya terbatas pada aktor negara, tetapi juga aktor non-negara. Dalam kasus LVC dan SPI, aktivisme transnasional beserta kemajuan-kemajuan yang telah dicapai menunjukkan bahwa aktor non-negara memiliki signifikansi penting dalam politik global kontemporer.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Baylis, J., Owens, P., & Smith, S. (2017). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford University Press.
- [2] Bohstedt, J. (2016). Food riots and the politics of provisions from early modern Europe and China to the food crisis of 2008. *The Journal of Peasant Studies*, 43(5), 1035–1067. <https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1170009>
- [3] Borras Jr, S. M., Franco, J. C., & Suárez, S. M. (2015). Land and food sovereignty. *Third World Quarterly*, 36(3), 600–617. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1029225>
- [4] Bourad, A. (2017). José Bové makes the front page: The social construction of a “political miracle.” *Societes Contemporaines*, No 106(2), 45–72.
- [5] Claeys, P. (2013). From Food Sovereignty to Peasants’ Rights: An overview of La Via Campesina’s Rights-based claims over the last 20 years. *Food Sovereignty: A Critical Dialogue*.
- [6] Clapp, J. (2015). Food Security and Contested Agricultural Trade Norms. *Journal of International Law & International Relations*, 11(2), 104.
- [7] Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE.
- [8] Declaration of Nyeleni. (2007). *Declaration of Nyeleni*. <https://nyeleni.org/spip.php?article290>
- [9] Edelman, M., & Borras, S. M. (2016). *Political Dynamics of Transnational Agrarian Movements*. Practical Action Publishing, Fernwood Publishing. <https://doi.org/10.3362/9781780449142>
- [10] Ellinger, A. D., Watkins, K. E., & Marsick, V. J. (2005). *Case study research*



- methods. *Research in organizations: Foundations and methods of inquiry*. Berrett-Koehler Publishers.
- [11] European Cordination Via Campesina. (2018). *Food Sovereignty NOW! A Guide to Food Sovereignty*. European Cordination Via Campesina.
- [12] FAO. (2013). FAO will cooperate with La Via Campesina, the largest movement of small-scale food producers in the world. <http://www.fao.org/news/story/en/item/201824/icode/>
- [13] FAO, W. (2019). *The state of food security and nutrition in the world 2019: Safeguarding against economic slowdowns and downturns*. Rome, Italy: FAO.
- [14] Gemici, K., & Nair, M. (2016). Globalization and Its Countermovement: Marxian Contention or Polanyian Resistance? *Sociology Compass*, 10(7), 580–591. <https://doi.org/10.1111/soc4.12389>
- [15] Goodwin, G. (2018). Rethinking the Double Movement: Expanding the Frontiers of Polanyian Analysis in the Global South. *Development and Change*, 49(5), 1268–1290. <https://doi.org/10.1111/dech.12419>
- [16] Graddy-Lovelace, G. (2017). Latent alliances: The Women’s March and agrarian feminism as opportunities of and for political ecology. *Gender, Place & Culture*, 24(5), 674–695. <https://doi.org/10.1080/0966369X.2017.1342604>
- [17] Hoddy, E. T., & Ensor, J. E. (2018). Brazil’s landless movement and rights “from below.” *Journal of Rural Studies*, 63, 74–82.
- [18] Holt Giménez, E., & Shattuck, A. (2011). Food crises, food regimes and food movements: Rumblings of reform or tides of transformation? *The Journal of Peasant Studies*, 38(1), 109–144. <https://doi.org/10.1080/03066150.2010.538578>
- [19] Holt-Giménez, E. (2017). *A Foodie’s Guide to Capitalism*. NYU Press.
- [20] International Planning Committee for Food Sovereignty (IPC). (2015, August 28). IPC. <http://www.foodsovereignty.org/about-us/>
- [21] KKRK. (2019). *Sejarah. Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan*. <https://kedaulatanpangan.org/sejarah/>
- [22] La Via Campesina. (2016). *La Via Campesina | Organisational Brochure | Edition 2016—Via Campesina*. Via Campesina English. <https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-organisational-brochure-edition-2016/>
- [23] La Via Campesina, 25. (2019). *The international peasant’s voice—Via Campesina*. Via Campesina English. <https://viacampesina.org/en/international-peasants-voice/>
- [24] Neuman, W. L. (2013). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education.
- [25] Porta, D. della (Ed.). (2004). *Transnational Protest and Global Activism*. Rowman & Littlefield Publishers.
- [26] Purwanto, H. (2007). *Serikat Petani Indonesia dalam Perjuangan Pembaruan Agraria di Indonesia Periode 1998-2011*. Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- [27] Redecker, S. von, & Herzig, C. (2020). The Peasant Way of a More Than Radical Democracy: The Case of La Via Campesina. *Journal of Business Ethics*, 164(4), 657–670. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04402-6>
- [28] Rosa, M. C. (2015). A journey with the Movimento dos trabalhadores rurais sem terra (MST) across Brazil and on to South



- Africa. *Études Rurales*, 196, 43–56. <https://doi.org/10.4000/etudesrurales.10371>
- [29] Rosset, P. (2018, April 9). Evolution of the struggle for land and territory in La Via Campesina International. *Reframing Latin American Development*. <https://doi.org/10.4324/9781315170084-9>
- [30] Snow, D. A., Soule, S. A., Kriesi, H., & McCammon, H. J. (2018). *The Wiley Blackwell Companion to Social Movements*. John Wiley & Sons.
- [31] SPI. (2015). *Kedaulatan Pangan*. Serikat Petani Indonesia. <https://spi.or.id/isu-utama/kedaulatan-pangan/>
- [32] SPI. (2017, July 21). *Konferensi ke-7 La Via Campesina: Tegakkan Kedaulatan Pangan di Masing-Masing Negara*. Serikat Petani Indonesia. <https://spi.or.id/konferensi-ke-7-la-via-campesina-tegakkan-kedaulatan-pangan-di-masing-masing-negara/>
- [33] Tarrow, S. (2005). *The New Transnational Activism*. Cambridge University Press.
- [34] Tarrow, S. (2011). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics* (3 edition). Cambridge University Press.
- [35] Turniawan, M. (2013). *Demanding Food Sovereignty: La Vía Campesina and the Global Food Movement / Exiger la souveraineté alimentaire: La Vía Campesina et le mouvement alimentaire mondial*. *Glendon Journal of International Studies / Revue d'études Internationales de Glendon*, 6(0). <https://gjis.journals.yorku.ca/index.php/gjis/article/view/36442>
- [36] *Via Campesina*. (2003, September 1). *Position Via Campesina Cancun*. *Via Campesina English*. <https://viacampesina.org/en/position-via-campesina-cancun/>
- [37] Wittman, H., Desmarais, A., & Wiebe, N. (2010). The origins and potential of food sovereignty. *Food Sovereignty: Reconnecting Food, Nature and Community*, 1–14.
- [38] Zajak, S. (2017). Rethinking Pathways of Transnational Activism. *Global Society*, 31(1), 125–143. <https://doi.org/10.1080/13600826.2016.1235549>





HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN